



DE-RADIKALISASI ISLAM, KHILAFAH DAN PENDIDIKAN PANCASILA DI KOMUNITAS WAHABISME DI INDONESIA

Saipul Hamdi*, Fadli Mulyadi, Swarto
Departmen Sosiologi, Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB. 83115

Submitted: 28th May 2021

Revised: 18th July 2021

Accepted: 23th Dec 2021

Abstract *Wahhabism is one of the transnational Islamic movements famous for its ultra-conservative ideology and massively spread worldwide. Wahhabism has caused controversy in Muslim society since it appears as a political and religious purist movement controlling the two grand mosques, not only because of its ideological factor that against local tradition and cultural practices which they claim as heresy and misleading Islam, but also the complex approach on teaching Islam that they choose as identity. Most Wahhabi scholars applied a hard approach to syncretic Islamic practices as they claim part of innovation that never applied in Muhammad's time. The hard approach's consequence is rejection from the local Muslim community, and many of them are ending in a prolonged conflict between Wahhabi followers and local people. This article aims explicitly to examine Wahhabi figure's effort to change the hard approach to the soft approach, which I call de-radicalization of Islam to be accepted and warm welcome in society. Besides that, the article also explores the development of khilafah Islamiyah discourses in the Wahhabi community. This aim is based on Muslim questions and curiosity regarding Wahhabi intention to establish an Islamic state based on shariah practices. Related to this issue, the article also explores the government intervention on implementation of Pancasila ideology into the Wahhabi school curriculum and education on nationalism.*

Keywords: *Wahabism, de-radicalization of Islam, khilafah Islamiyah, Pancasila, and national insight*

Abstrak Wahabisme merupakan salah satu varian Islam yang ultra konservatif lahir di Saudi Arabia pada abad ke-18 kemudian menyebar sebagai gerakan ideologis transnasional yang mengkampanyekan suara pemurnian Islam, pemberlakuan syariat Islam dan pendirian khilafah Islamiyah. Gerakan ini menimbulkan kontroversi di masyarakat karena selain menentang praktik budaya dan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat, para ulama dan jemaah Wahhabi juga dikenal keras dan tanpa kompromi dalam dakwahnya. Sebagian besar ulama Wahhabi menggunakan hard approach dalam praktik dakwahnya menyerang dan menantang secara terbuka kelompok yang diklaim syirik, sesat dan ahli bidah karena tidak mengikuti “sunnah” Rasulullah. Akibatnya, ajaran Wahabi seringkali mengalami penolakan, benturan dan konflik sosial dengan penduduk lokal. Artikel ini secara khusus bertujuan untuk menguji upaya de-radikalisasi Islam (melepaskan Islam dari tindakan radikal), dan upaya mengubah pendekatan dakwah yang keras dan radikal menjadi lembut dan

*shamdi@unram.ac.id

moderat supaya diterima oleh masyarakat. Selain itu artikel ini mengeksplorasi perkembangan diskursus khilafah Islamiyah di komunitas Wahhabi karena selama ini ajaran Wahhabi menekankan pemberlakuan syariat Islam dan pendirian negara Islam. Dalam merespon fenomena ini bagaimana upaya pemerintah dalam mengintervensi dan menanamkan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di komunitas pendidikan mereka.

Kata Kunci: Wahabisme, de-radikalisasi Islam, khilafah Islamiyah, Pancasila, dan wawasan kebangsaan

PENDAHULUAN

Penyebaran ideologi dan dakwah Salafi-Wahabism di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai daerah (Delong-Bas, 2007; Hasan, 2007; Indra, 2017; Rohmaniyah & Woodward, 2012). Dakwah Wahhabi berhasil merekrut masyarakat lokal sebagai anggota dan mengarahkannya tinggal dalam satu kompleks khusus yang tidak tercampur dengan kelompok lain. Biasanya mereka tinggal di kompleks pesantren Wahhabi bersama santri-santri yang belajar di sana dalam rangka menjaga ibadah dan pemurnian ritual (Hamdi et al., 2015). Keberadaan anggota Wahhabi yang tinggal di lingkungan pesantren tidak hanya menambah keramaian pesantren itu sendiri, tetapi juga berperan mendukung aktivitas keagamaan di lingkungan pesantren ini. Hasilnya, pesantren Wahhabi mengalami perkembangan yang cepat, massif dan nampak besar dari luar. Namun di sisi lain pola pengembangan pesantren dengan integrasi komunitas yang khusus dari kalangan Wahhabi seperti ini melahirkan kecurigaan dan image negatif di masyarakat bahwa Wahhabi tidak terbuka, eksklusif dan mengisolir diri dari komunitas yang lebih luas dan plural.

Pola eksklusif, tertutup dan cenderung mengisolir diri telah mengundang kecurigaan dari masyarakat dan pemerintah ke pesantren dan komunitas Wahhabi. Setiap kejadian teror kecurigaan selalu mengacu kepada pesantren dan komunitas Wahhabi padahal belum tentu mereka terlibat di dalam aksi tersebut. Pemerintah seringkali menginvestigasi pesantren mereka ketika muncul kasus pengeboman. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi perubahan sikap di internal Wahhabi dalam merespon kecurigaan dan investigasi dari pemerintah terhadap pesantren dan komunitas Wahhabi tentang potensi keterlibatan mereka selama ini dalam aksi radikalisme dan terorisme. Kami berargumen bahwa ada kecenderungan perubahan sikap

yang ditunjukkan oleh Wahhabi termasuk dalam pola interaksi sosial mereka yang lebih terbuka dan lebih lembut.

Artikel ini juga akan menguji hasil riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti internasional termasuk Simon Ross Valentine (2015), (2015), David Dean Commins (2009), Mohammed Ayoob (2009), Jones (2014), Rubin (2010) Moore dan Paul (2009), Abdulai Iddrisu (2009), Romero (2007), dan Lauziere (2010) yang mengklaim adanya hubungan Wahhabi dengan aksi radikalisme dan terorisme dengan melihat konteks Wahhabi di Indonesia terkait upaya mereka dalam mendirikan negara Islam atau *khilafah Islamiyah*. *Khilafah Islamiyah* menjadi trend di kalangan kelompok Salafi dan Wahhabi, oleh karena itu sangat penting untuk melihat diskursus dan aksi di lapangan atas pengembangan ideologi ini. Pemerintah telah membubarkan Ormas Islam yang memiliki agenda pendirian khilafah Islamiyah seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Di kalangan Wahhabi sendiri belum terlihat upaya pemerintah membubarkan kelompok ini. Selain itu, artikel ini juga menginvestigasi upaya intervensi yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di komunitas pendidikan Wahhabi.

Pandangan Natana J. Delong-Bas (2007) akan digunakan untuk memperkuat argumen bahwa Wahhabi tidak mengajarkan kekerasan dalam teks-teks keagamaan mereka. Stereotype dan miskonsepsi yang berkembang selama ini karena kesalahan dalam membaca pemikiran pendiri Wahabi. Dia melihat ekstrimis kontemporer seperti Osama bin Laden tidak memiliki dasar kuat dalam ajaran Wahhabisme yang autentik. Tanda jihad yang fokus pada kultus syahid (martir), kerusakan dalam skala besar pada kehidupan masyarakat dan properti, dan panggilan untuk jihad global tidak ditemukan dalam tulisan Muhammad ibn Abdul Wahhab. Malahan, sikap dan pendirian militan jihadis kontemporer berada dalam ketaatan pada karya sarjana abad pertengahan misalnya Ibn Taymiyya, dan tokoh radikal Mesir abad ke 20, Sayyid Qutb. Pandangan Delong-Bas ini akan diuji dengan kondisi lapangan sejauhmana Wahhabi di Indonesia melakukan aksi kekerasan termasuk aksi radikalisme dan jihadisme.

METODE PENELITIAN

Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian etnografi yang menerapkan pendekatan kualitatif dalam proses pengumpulan dan analisa

data. Lokasi penelitian difokuskan pada lembaga-lembaga pendidikan Wahhabi di tiga propinsi yaitu Nusa Tenggara Barat (Pesantren Assunah dan Jamaluddin), dan Kalimantan Timur (Pesantren Ibnul Qoyyim dan Hidayatullah) dan di DKI Jakarta (Lipia Jaksel). Alasan memilih ketiga provinsi ini karena dikenal sebagai basis gerakan Wahabisme-Salafisme dan juga merupakan daerah kunci yang memainkan peran penting dalam pendidikan dan dakwah keIslaman Wahhabi. Ketiga daerah ini juga memiliki perbedaan setting sosial-politik dan ekonomi sehingga sangat menarik melihat variasi data yang akan muncul di lapangan. Penelitian ini dilakukan selama satu tahun. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data yaitu metode observasi-partisipasi, *in-depth interview*, fokus diskusi kelompok (FGD) dan dokumentasi. Pendekatan dalam analisa data menggunakan pendekatan tematik analisis dengan mengidentifikasi dan menafsirkan pola-pola dan tema dari hasil pengkodean data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

De-Radikalisasi Islam di Tubuh Wahhabi

Maraknya aksi kekerasan atas nama agama yang menargetkan masyarakat non-Muslim terutama gereja-gereja oleh kelompok teroris telah menyeret nama kelompok Wahhabi atau Salafi di dalam aksi tersebut. Aksi pengeboman di gereja Oikemene 13 Nopember 2016 di Samarinda misalnya telah berdampak luas terhadap pondok pesantren Wahhabi di sekitar Kalimantan Timur termasuk Pesantren Ibnul Qoyyum di Balikpapan, yang dicurigai oleh pemerintah terlibat di dalam aksi pengeboman. Ahmad, salah satu guru di Pesantren ini menyatakan bahwa aparat kepolisian mencurigai mereka dan melakukan investigasi ke Pesantren ini setiap ada kasus pengeboman. Kecurigaan ini sangat merugikan pesantrennya padahal mereka murni menyelenggarakan pendidikan agama dan dakwah, bukan gerakan politik melawan pemerintah atau gerakan yang bertentangan dengan hukum. Karena merasa tidak terlibat dalam aksi apapun terutama dalam aksi radikalisme dan terorisme, maka pihak guru Pesantren Ibnul Qoyyum memilih untuk terbuka kepada siapapun jika ingin melihat ke dalam.

Pesantren Hidayatullah dan cabang-cabangnya di Indonesia juga mengalami nasib yang sama, mereka mengalami pantauan yang reguler dari pihak aparat keamanan. Pantauan reguler ini dilakukan oleh aparat karena adanya riwayat dan hubungan dengan pelaku bom Bali 1 yang disembunyikan

oleh salah satu guru Pesantren Hidayatullah pada saat itu (Hamdi et al., 2015: 2-3). Pesantren Hidayatullah juga diyakini memiliki hubungan dekat dengan Pesantren Ngruki, Sukoharjo Jawa Tengah di bawah pimpinan ketua JAT Abu Bakar Baasyir. Salah satu bukti adalah beberapa guru sengaja direkrut dari alumni Pesantren Ngruki untuk mengajar agama di Pondok Hidayatullah. Ketika terjadi pengeboman di Kaltim atau di wilayah lain Indonesia, perhatian aparat langsung tertuju kepada Pesantren Hidayatullah dan melakukan investigasi. Fenomena yang sama juga dihadapi oleh Pesantren Wahhabi yang lain termasuk di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Jakarta, di mana aparat keamanan melakukan pantauan di setiap pengeboman terjadi, meskipun tidak ada santri mereka yang terbukti terlibat.

Kecurigaan terhadap Pesantren yang beraliran Salafi-Wahhabi atas keterlibatan mereka pada aksi pengeboman tempat ibadah agama lain bukan tidak memiliki dasar dan alasan. Pemerintah melihatnya sebagai satu “entitas ideologi” yang mengancam eksistensi negara terutama agenda mereka yang ingin menegakkan syariat Islam dan membangun khilafah Islamiyah. Bahkan Said Aqil Siradj ketua umum PBNU baru-baru ini mengeluarkan statemen bahwa Salafi-Wahhabi adalah pintu masuk radikalisme” (Gunadha & Sari, 2021). Pandangan pemerintah dan sebagian tokoh-tokoh Islam tentang Salafi dan Wahhabi kadang berbeda dengan kondisi di lapangan. Istilah Wahhabi dan Salafi adalah dua istilah yang memiliki kemiripan tetapi tidak sama. Tidak semua Salafi itu Wahhabi, tetapi Wahhabi itu pasti Salafi. Salafi mengacu pada metode beragama yang merujuk pada kehidupan Nabi dan Sabahat generasi pertama. Sedangkan Wahhabi merujuk pada tafsir tertentu tentang teks agama yang sangat rigid dan skripturalis (Dillion, 2009: 33). Di dalam Salafi itu sendiri banyak varian-variannya dengan penekanan pada aspek-aspek tertentu sesuai dengan orientasi dan kepentingan kelompok yang menerapkan metode tersebut.

Kelompok Wahhabi merujuk pada pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab yang melakukan pemurnian Islam di abad ke-18. Abdul Wahhab adalah tokoh agama, reformis, ulama dan theologian dari Najd Arab Saudi bagian Tengah (Dillion, 2009; Valentine, 2015; Commings, 2009). Ide pemurnian ini pernah dilakukan sebelumnya oleh Syaikh Taqiuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam atau yang populer dengan nama Ibnu Taimiyah di abad ke 13. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai tokoh yang kontroversial dengan keahlian sebagai ahli hukum Islam, sarjana, muhaddis,

teolog, hakim, filsuf, ekonom dan polymath (Valentine, 2015; Rubin, 2010; Iddrissu, 2009). Di dalam Wahhabi dan Salafi terdapat identitas dan karakter khusus dari gerakan tersebut meskipun sama-sama memiliki agenda pemurnian dan pembaharuan. Sebagai contoh, gerakan Ikhwanul Muslimin dan Wahhabi memiliki kesamaan dalam praktik ibadah dan penerapan syariah, namun dalam metode, pendekatan dan orientasi politik-keagamaan sangat berbeda dalam mencapai target itu. Ikhwanul Muslimin mempunyai agenda meraih kekuasaan melalui jalur politik dengan semboyan yang terkenal "*Islam is the solution*" dan chariti adalah bahan bakarnya. Kelompok Ikhwan menilai bahwa dengan mengambil kekuasaan di jalur struktur politik maka agenda keagamaan dapat dijalankan (Umma, 2014: 58). Oleh karenanya, kelompok Ikhwanul Muslimin berhasil meraih kekuasaan di Mesir mengantarkan Mursi sebagai presiden. Ikhwanul Muslimin mengembangkan sayap ideologinya di berbagai negara dengan nama yang berbeda-beda. Di Indonesia partai PKS diklaim sebagai representasi dari partai Ikhwanul Muslimin.

Sedangkan Wahhabi sendiri lebih fokus pada gerakan dakwah dan pendidikan keagamaan tanpa menyentuh wilayah politik terutama di luar kawasan Timur Tengah. Banyaknya alumni dari Indonesia yang belajar di Arab Saudi, Yaman, Sudan dan Mesir ketika pulang mereka membangun pondok pesantren dan berdakwah menjadi kyai dan ustaz. Hanya sebagian kecil yang ikut di partai politik, mereka lebih banyak konsen di dunia pendidikan Islam. Mereka yang ikut partai politik mayoritas bergabung ke partai PKS. Hampir semua tokoh yang belajar di Timur Tengah pulang membawa ideologi Wahhabi kemudian membangun pondok pesantren dan berdakwah keliling di masyarakat. Identitas Wahhabi secara fisik adalah berjenggot panjang, tanda hitam di dahinya, celana cingkrang, cadar bagi kaum perempuannya, dan jubah warna putih.

Tidak hanya di level nasional, tetapi juga di level internasional ajaran Wahhabi mendapat atensi dari berbagai negara terkait dengan keterlibatan anggota Wahhabi dalam jaringan terorisme global. Keterlibatan Osamah bin Laden dalam aksi terorisme 9/11 yang menyerang pusat perdagangan dunia WTC dan Pentagon di New York telah menyeret nama aliran Wahhabi ke dalam diskursus radikalisme dan terorisme (Jones & Rand 2014; Lauziere, 2010; Siddiq, 2009; Wulandari, 2014). Osama dikenal sebagai keturunan bangsawan Saudi Arabia yang diasumsikan bagian dari kelompok Wahhabi.

Osama berasal dari keluarga milioner Muhmmad bin Awad bin Laden dari Hadramaut Yaman, pendiri perusahaan Saudi Binladin Group. Ibunya berasal dari Suriah bernama Najwa Ghanem. Dia lahir di Arab Saudi dan menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Negara tersebut hingga 1979, ketika dia ikut berjihad di Afghanistan melawan Uni Soviet (Romero, 2007: 454). Dia membantu pengumpulan dana dan petarung dari Arab Saudi berperang membantu Mujahidin yang membuat dirinya meraih popularitas di negara-negara Arab.

Pada tahun 1988 dia mendirikan Al-Qaeda, organisasi yang dilarang oleh Arab Saudi 1992 yang memaksa Osama berpindah ke Sudan. Amerika terus mendesak Osama keluar dari Sudan dan membangun basis di Afghanistan, di mana dia mulai mendeklarasikan perang melawan Amerika dan sekutu (Romero, 2007: 453). Al-Qaeda telah melakukan beberapa serangan ke kedutaan Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah dan di negara yang dianggap sekutu Amerika. Osama juga berhasil membangun jaringan internasional Al-Qaeda termasuk yang sukses di Asia Tenggara (Asal et al., 2008: 981). Setelah dituduh sebagai otak serangan WTC dan gedung militer Pentagon 11/9 yang menewaskan 3000 orang memancing Amerika dan negara sekutu kampanye perang melawan teroris secara masif dan global. Dari kasus inilah muncul asumsi dan penafsiran tentang peran ajaran Wahhabi yang mendorong aksi radikalisme menjadi isu yang terus berkembang di dunia akademik. Peneliti seperti Simon Ross Valentine (2015) Natana J. Delong-Bas (2004) telah menulis artikel dan buku tentang relasi antara Wahhabi dan radikalisme.

Tuduhan-tuduhan dari masyarakat internasional prihal keterlibatan Wahhabi dan Salafi dalam aksi radikalisme dan terorisme berdampak luas pada level nasional sehingga mendorong para kyai, guru dan tokoh-tokoh Wahhabi membuka diri dan mengundang kelompok luar termasuk pemerintah dan Ormas mengecek langsung aktivitas belajar santri mereka. Selama ini Pesantren Wahhabi terkesan eksklusif dan membatasi akses orang luar di pesantren mereka. Meskipun tidak ada aturan larangan masuk ke lingkungan pesantren, namun penjagaan yang ketat dan konstruksi bangunan yang ditembok keliling memaksa orang luar tidak punya akses. Segregasi antara kaum perempuan dan laki-laki ikut memberikan kontribusi atas kesan eksklusifitas dan konservatisme dalam praktik keIslaman mereka, di mana perempuan tidak boleh menegur laki-laki atau sebaliknya. Pesantren mereka

dikelilingi tembok besar dan di dalamnya terdapat warga Wahhabi yang tinggal dengan bangunan rumah di dalamnya. Pola regenerasi mereka tidak hanya sebatas membina siswa, tetapi juga jamaah yang ingin ikut menjadi bagian dari dakwah Wahhabi menyatu dengan santri sehingga aktivitas keagamaan mereka terjaga. Temuan kami di lapangan menunjukkan adanya perubahan di dalam pendekatan mereka kepada kelompok luar yang lebih terbuka dan mengedepankan dialog. Mereka juga mengurangi tensi serangan kepada praktik sinkretisme di masyarakat lokal yang tidak bersumber dari Islam. Biasanya tokoh-tokoh Wahhabi selalu menyerang praktik-praktik lokal yang dinilai keluar dari Islam dan tidak memiliki sumber teks kitab suci. Akibatnya, konflik dan kekerasan dengan warga lokal tidak dapat dihindari.

Saya berargumen bahwa adanya perubahan sikap ini menunjukkan upaya deradikalisasi Islam secara internal oleh kelompok Wahhabi. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka juga kelompok yang anti kekerasan dan bukan bagian dari terorisme. Wahhabi yang murni hanya bergerak dan fokus ke dunia dakwah dan pendidikan, sedangkan kelompok yang keluar terlibat dalam aksi radikalisme dan terorisme dikenal dengan Wahhabi jihadis, di mana mereka terkontaminasi pengaruh politik luar. Mengutip komentar KH. Kholil Nafis, alumni LIPIA Jakarta dan pengurus MUI, Wahhabi itu telah banyak berubah pendekatannya, dulu awal-awal sangat keras dalam dakwah menantang semua orang yang berbeda dengan paham mereka, namun sekarang mulai soft dan memperhatikan kondisi masyarakat lokal. Dia juga menceritakan keterbukaan lembaga LIPIA yang memberikan akses kepada dosen-dosen luar selain Arab Saudi. Dosen dari Arab Saudi hanya mengajar mata kuliah tauhid dan akidah, sedangkan di luar itu seperti sejarah Islam, fiqh dan ilmu hadis diajarkan oleh orang lain. Di antara dosen-dosen yang mengajar berasal dari Yaman, Sudan, dan Yordania. Mahasiswa yang belajar juga berasal dari berbagai daerah dengan tradisi keagamaan yang cukup beragam mulai dari Jakarta, Jawa, Lombok, Aceh, Jatim, dan Jabar.

Khilafah dalam Diskursus Wahhabi

Khilafah merupakan salah satu sistem pemerintahan di dalam Islam, yang mana pemimpin disebut dengan khalifah. Kata *khilafah* berasal dari kata *khilafa* yang berarti menggantikan, mengganti sebagai pemimpin. Selain khalifah terdapat juga istilah amir dan imam yang sama-sama memiliki makna pemimpin. Istilah *khilafah* menimbulkan pro dan kontra di era demokrasi

modern karena sistemnya dianggap tidak sempurna, sektarian, eksklusif dan abstrak. Munculnya kembali ide khilafah di Indonesia dilatar belakangi oleh kekecewaan dan rasa frustrasi sebagian masyarakat Muslim terhadap pemerintah yang tidak mampu menyelesaikan persoalan yang kompleks di tengah masyarakat (Sahrasad et al., 2019: 71). Jadi, sistem khilafah dipercayai sebagai jalan alternative ketika sistem demokrasi liberal dan ideologi Pancasila tidak menawarkan solusi yang tepat. Sarasad et al. (2019: 771-72) menyatakan transisi di Indonesia yang memakan waktu panjang memberi ruang lahirnya kekuatan kelompok Islamis, partai Islam dan ide pendirian khilafah (Islamic state) sebagai bangunan moral yang lebih baik dan negara yang sejahtera. Meskipun terlihat menjanjikan namun dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk di semua bidang sulit untuk merealisasikan ideologi khilafah ini.

Menguatnya diskursus tentang khilafah Islamiyah di ruang publik menimbulkan reaksi cepat dari pemerintahan Jokowi. Pemerintah sangat khawatir dengan wacana ini sampai harus membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 19 Juli 2017 karena aktif menyuarakan pemberlakuan *khilafah Islamiyah* (Prasetyo, 2019: 257). Setidaknya tiga alasan pemerintah membubarkan yaitu, pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Prasetyo, 2019: 258). Pemerintah juga membubarkan Fron Pembela Islam (FPI) pada 30 Desember 2020 yang salah satu alasannya karena FPI juga mengusung khilafah dan negara Islam.

Pro dan kontra tentang sistem khilafah masih berkembang di masyarakat. Sulit bagi kelompok Muslim untuk menolak sistem khilafah karena menjadi bagian dari sejarah Islam, tetapi tidak mudah juga untuk merealisasikannya karena terbentur Undang-Undang. Berbagai tafsir juga muncul terkait khilafah di kalangan tokoh agama, sarjana dan pemerintah. Mahfud MD, tokoh NU dan Menkopulhukam mempertanyakan keberadaan sistem khilafah yang tidak dia ditemukan di dalam Islam. Istilah *khilafah* atau

khilafah ada, namun sistemnya yang tidak dibahas secara spesifik dalam Islam. Dia juga menegaskan tidak ada dalil tentang sistem khilafah di Al-Quran, artinya bahwa sistem pemerintahan boleh bermacam-macam dengan tujuan untuk perdamaian. Mahfud juga menyatakan negara Madinah yang dibangun oleh Rasul tidak bisa ditiru 100% karena Nabi memiliki tiga hak perioritatif misalnya nabi memiliki otoritas eksekutif, yudikatif dan legislatif. Dia membuat hukum karena mendapat wahyu dari Allah secara langsung. Kita tidak mungkin mencontoh beliau karena tidak ada lagi nabi sekarang ini (ILC, 2019). Mahfud memberikan bukti dari 57 negara Islam yang tergabung dalam OKI menganut sistem khilafah, tapi berbeda-beda. Hal tersebut bisa berbeda karena, dalam Alquran dan hadis, sistemnya tidak diajarkan.

Dalam sejarahnya, sistem khilafah muncul pasca wafatnya Rasulullah, pada waktu itu masyarakat Madinah menunjuk seorang khalifah dari sahabat-sahabat dekat nabi Muhammad. Dari penunjukan keempat sahabat Muhammad sebagai khalifah telah menimbulkan perdebatan tentang cara memilih pemimpin yang baru menggantikan Muhammad. Begitu juga dengan penggunaan gelar khalifah di kalangan para sahabat cukup beragam. Sahabat nabi pertama digelar khalifah Abu Bakar, sedangkan Umar lebih banyak dipanggil sebagai amirul mukminin, dan Ali biasanya dipanggil Imam Ali. Selama abad pertengahan tiga kekhalifahan yang saling bergantian memimpin yakni Khalifah Rasyidun (632-661), Khalifah Umayyah (661-750) dan Khalifah Abbasiyah (750-1517). Khalifah yang terbesar pasca Abbasiyah adalah kekhalifahan Ottoman yang berpusat di Turki (1517) setelah menaklukkan kerajaan Mesir dibawah kontrol dinasti Abbasiyah. Selain itu terdapat beberapa khalifah yang kecil-kecil seperti khalifah Ayyubi dari suku Kurdi yang berhasil mengambil alih Jerussalim ketika perang Salib (Amsori & Ernawati, 2019: 3).

Sistem kekhalifahan mulai memudar seiring munculnya sistem negara bangsa yang modern dimulai oleh negara-negara Eropa pada akhir abad ke 19. Penemuan teknologi dan revolusi industri telah melahirkan sistem kapitalisme yang juga memperkuat sistem negara bangsa yang awalnya ditandai dengan penjajahan kerajaan-kerajaan oleh bangsa Eropa ke berbagai wilayah termasuk di wilayah kerajaan Islam Nusantara. Akibatnya sistem kerajaan mulai rusak dan hilang beralih ke sistem negara bangsa. Hanya beberapa negara yang tersisa masih menganut sistem kerajaan atau monarki dalam pengelolaan wilayahnya seperti Arab Saudi, Qatar, Yordania, dan Brunei Darussalam. Di negara modern kerajaan lebih bersifat simbolik,

mereka tidak lagi memiliki akses yang luas di pemerintahan termasuk Raja di Inggris, Thailand, Indonesia dan Malaysia.

Ideologi khilafah menjadi titik pelarian ketika sistem demokrasi dan negara bangsa menimbulkan berbagai persoalan sosial baru atau setidaknya tidak mampu mengatasi seluruh masalah yang muncul di lapangan seperti ketimpangan sosial, ketidakadilan, pengangguran, kebebasan, dan skularisasi yang ekstrim. Fakta yang berkembang di lapangan bahwa wacana pendirian *khilafah Islamiyah* tidak hilang sama sekali, akan tetapi terus berkembang dan menjadi trend dalam tiga dekade ini oleh kelompok gerakan keagamaan nasional dan transnasional yang ingin menempatkan Islam sebagai pusat sistem pemerintahan. Kelompok-kelompok Islamisme yang berasal dari Organisasi sosial keagamaan seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Salafi dan Wahhabi memperjuangkan tegaknya sistem *khilafah* dan mengganti sistem demokrasi yang mereka nilai gagal dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Ideologi *khilafah* dibangun berdasarkan hukum Islam dan Tuhan sebagai pusat dan tujuan bernegara. Gerakan *khilafah* mengalami polarisasi di komunitas Muslim, yang pendekatan dan metodenya bermacam-macam. Khilafah tidak lagi menjadi identitas tunggal, namun sangat beragam dan penuh dengan negosiasi dengan sistem demokrasi yang telah ada.

Meskipun Wahhabi setuju dan memiliki keinginan untuk mendirikan *khilafah Islamiyah*, akan tetapi pendekatan mereka lebih pasif dan tidak mewacanakan dan mengkampanyekan ke ruang publik. Di Indonesia Wahhabi tidak konsen pada isu politik dan kekuasaan, tetapi lebih pada dakwah dan pendidikan. Berbeda dengan Wahhabi di Arab Saudi yang memegang kekuasaan dalam struktur kerajaan. Para sarjana dan imam adalah mitra pihak kerajaan untuk menegakkan hukum Islam dan memainkan peran penting di dalam sistem pemerintahan. Majoritas Pesantren Wahhabi yang kami teliti tidak terlibat atau berafiliasi dengan partai politik manapun. Mereka membebaskan jamaahnya untuk memilih partai atau tokoh manapun di setiap Pilkada, Pilpres dan Pemilu. Seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Gafur, pimpinan Pesantren Ibnu Abbas Lombok Timur bahwa jamaah tidak pernah diarahkan memilih partai politik tertentu. Semua dibebaskan untuk memilih sesuai hati nurani mereka. Namun di kasus Pemilihan presiden yang kemarin 2019 secara pribadi dia memilih Prabowo karena alasan keagamaan

dan besarnya dukungan tokoh agama, yang mana lebih banyak ulama dan habaib mendukung Prabowo dibanding Jokowi.

Ketika ditanya tentang ide *khilafah*, dia menyatakan bahwa tidak ada ide sedikitpun menegakkan *khilafah Islamiyah* meskipun dia setuju karena fakta sejarah Islam yang menunjukkan adanya sistem kekhilafahan pasca Rasulullah. Namun sekarang telah berbeda kita menganut sistem demokrasi dan kami taat sama pemerintah. Kami tidak ikut demo anti pemerintah di jalan-jalan, bahkan kami rela diambil harta kami oleh pemerintah yang sah jika itu diperlukan dan kami tidak akan melakukan perlawanan. Bagi kami apa yang pemerintah berikan lebih dari cukup untuk menjalankan syariat Islam. Menurut ustaz Firanda Andirja, salah satu tokoh Wahhabi bahwa sistem *khilafah* itu idaman setiap Muslim. Semua kita ingin memiliki sistem *khilafah*, namun kita harus realistis karena sulit untuk menerapkan *khilafah* di bumi Indonesia ini. Sekarang setiap negara memiliki pemimpin, dan kita wajib taat kepadanya. Dia mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa 60 tahun kepemimpinan yang zalim atau diktator lebih baik dari satu malam tanpa pemimpin. Jangan memandang kepemimpinan sekarang tidak beres dan semua tidak baik, padahal katanya pemerintah telah melakukan banyak sekali kebaikan. Sekarang kita harus taat kepada pemimpin yang ada biar tidak ada kekacauan di negara ini sampai Allah akan menentukan *khilafah* nanti yang memimpin umat Islam di dunia.

Ustaz Abdullah dari Pesantren Jamaludin Al-Manar Wahhabi Lombok Timur memiliki pandangan yang sama bahwa mereka tidak pernah melawan pemerintah, sebaliknya sebuah kewajiban untuk taat kepada pemerintah. Menurutnya, Indonesia adalah negara Islam meskipun tidak menjadikan Islam sebagai asas bernegara karena pada dasarnya pemerintah telah memfasilitasi seluruh urusan terkait kebutuhan agama. Pemerintah memiliki struktur khusus keagamaan seperti Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia dan pengakuan kepada organisasi Islam termasuk Muhammadiyah, NU, NW, Wahhabi, Al-Irsyad, Jamaat Tabligh dan lain-lain. Pendapat ustaz Abdullah sangat menarik karena Indonesia sudah dinilai sebagai negara Islam ketika fasilitas keagamaan telah tersedia. Untuk urusan haji saja Indonesia memiliki biro khusus. Apa yang dikatakan oleh ustaz Abdullah ini secara tidak langsung mematahkan anggapan bahwa Wahhabi adalah kelompok yang anti pemerintah.

Kebebasan dalam menjalankan praktik keagamaan juga menjadi bagian dari hal yang fundamental dalam beragama. Siapa saja berhak dan dibolehkan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan tafsiran dan manhaj masing-masing. Ustaz Hadi, salah satu anggota Wahhabi menjelaskan bagaimana jamaahnya menggunakan cadar tanpa dilarang oleh pemerintah. Justus tantangannya bukan dari pihak pemerintah, namun dari masyarakat sendiri yang belum siap menerima perbedaan. Kami lebih banyak menghadapi konflik dengan masyarakat bawah karena perbedaan dalam memahami teks keagamaan dan praktik budaya lokal. Dengan pemerintah selama ini kami bekerja sama dengan baik, tidak pernah ada masalah.

Ustaz Khalid Basalamah (2020) memiliki pandangan yang sama, *khilafah* itu kita butuhkan. Negara kita sudah menganut sistem *khilafah*, jika ada yang baik kita terima, dan jika ada yang tidak baik dan bertentangan dengan syariah kita kritik dan diskusikan dengan pemerintah tetapi dengan cara-cara yang sopan, halus, bukan dengan cara demo dan merusak. Apalagi kudeta itu sangat diharamkan oleh Islam. Tidak ada dalil tentang pembolehkan demo atau kudeta, dalilnya tidak saya temukan katanya. Yang ada adalah jihad dengan cara memberitahukan kepada pemimpin yang zolim atas kezalimannya. Jika keluar ramai-ramai dan protes itu tidak ada dalilnya, mungkin ada ustaz yang lain memiliki dalil tentang ini silahkan, ini menurut saya pribadi, katanya. Ketika ditanya apakah akan ikut di aksi 212 yang diiklankan oleh ulama Saudi untuk ikut aksi, dia menyatakan jangan pernah bertanya lagi tentang hal ini karena sangat sensitif. Sekarang kita kembali ke Islam apakah ada demonstrasi, demo itu hasilnya perusakan, dan ulama salaf pada waktu itu banyak masalah tetapi tidak pernah demo. Jika demo karena partai politik berbeda hukumnya dengan demo karena penistaan, saya kembalikan ke masing-masing individu. Saya tidak bisa berkomentar banyak tentang hal ini.

Intervensi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Sekolah Wahhabi

Konservatisme agama di dalam manhaj dan pendidikan keagamaan Wahhabi menimbulkan pertanyaan tentang pembelajaran Pancasila dan wawasan kebangsaan di kurikulum sekolah dan perguruan tinggi mereka. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pesantren Wahhabi tidak mengajarkan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada siswanya. Sebagian

besar pesantren Wahhabi bersifat independen tidak bergabung dengan program lembaga pendidikan keagamaan pemerintah. Oleh karena itu kurikulum mereka sangat khas yakni belajar kitab tauhid, akidah, fiqh, ushul fiqh, dan bahasa Arab. Pesantren yang memiliki madrasah atau sekolah Islam terpadu tentunya mengikuti kurikulum pemerintah belajar pelajaran umum, namun pesantren tipe ini tidak banyak di komunitas Wahhabi. Bisa dipastikan bahwa di pesantren Wahhabi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat minim. Kondisi ini dapat menjadi trigger lahirnya sikap radikalisme dan terorisme tidak hanya pada agama lain, tetapi juga kepada pemerintah yang sah.

Indonesia yang tidak menganut hukum Islam dalam bernegara seringkali mendapat resistensi dari sebagian umat Islam. Bagi kelompok Islamis yang berhaluan teroris memandang Indonesia sebagai negara kafir yang harus diperangi karena tidak menerapkan hukum Islam seperti yang ditawarkan oleh Al-Quran. Bahkan mereka hidup di luar kontrol undang-undang dan menciptakan sendiri suasana keagamaan mereka. Misalnya di komunitas pesantren Hidayatullah Balikpapan diharamkan merokok di dalam lingkungan pesantren. Ustaz-ustaz yang mengajar dan tinggal di sana tidak boleh merokok. Para istri ustaz dan santri juga diwajibkan pakai cadar. Kelompok Wahhabi juga menciptakan sendiri ruang sosial mereka yang lebih Islami misalnya dengan menggunakan cadar di komunitas mereka. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim hidup secara terpisah. Yang banyak menimbulkan masalah misalnya ketika mereka tidak mau hormat bendera pada acara apel atau hari besar nasional. Mereka menilai bahwa hormat bendera bagian dari kesyirikan karena menghormati benda mati. Tentu pemaknaan ini tidak sejalan dengan prinsip negara modern dan demokrasi, di mana setiap negara memiliki simbol yang sakral yaitu bendera. Bendera menjadi identitas sebuah bangsa, jika ada aksi yang merusak atau membakar atau menghina bendera tersebut, sama artinya dengan merusak dan menentang negara itu. Resistensi yang berkembang ini membutuhkan negosiasi dan edukasi tentang wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila.

Kyai Muhammad Cholil Nafis menyatakan pemerintah perlu bertindak tegas kepada seluruh pesantren dengan aliran apapun untuk mengajarkan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Hal ini sangat penting supaya mereka memahami cara bernegara dan berbangsa karena terkait juga dengan interaksi sosial dengan kelompok luar. Di Arab Saudi, jamaah Wahhabi diajarkan

untuk loyal kepada pihak kerajaan, dan ini perlu ditiru oleh pemerintah Indonesia. Masak hidup di Indonesia tidak mau menghargai dan belajar tentang cara bernegara sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Haikal, salah satu aktivis juga berpendapat sama bahwa sangat urgen untuk mengajarkan Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada kelompok Wahhabi. Tidak cukup hanya belajar teks agama dengan tafsiran yang rigid karena dapat melahirkan sikap eksklusif dan fanatisme. Fenomena munculnya perumahan syariah di perkotaan telah mengakibatkan diskriminasi terhadap kelompok non-Muslim. Perumahan syariah hanya menerima mereka yang sesama agama, bahkan bila perlu sasama mazhab. Tentu fenomena ini tidak dapat diterima di negara modern, yang menekankan pembauran dan integrasi antar agama dan etnis dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian.

Temuan yang menarik akhir-akhir ini adalah adanya perubahan sikap di beberapa pesantren Wahhabi yang mulai moderat dan terbuka dengan komunitas lain. Di setiap tanggal 17 Agustus misalnya pesantren Wahhabi memasang bendera merah putih sebagai simbol ikut merayakan dan menjadi bagian dari NKRI. Mereka juga mulai lembut dalam berdakwah di masyarakat karena khawatir akan memicu konflik. Selama ini Wahhabi dikenal dengan suara lantang, keras dan judgmental terhadap praktik keagamaan lokal. Mereka menyerang praktik ziarah kubur, perayaan maulid Nabi dan juga segala praktik berbau agama di luar teks yang dianggap bidah dan kesyirikan. Hal-hal yang bersifat furuiah ini yang menjadi kendala besar dalam dakwah Wahhabi ketika berhadapan dengan masyarakat lokal.

Wahhabisme di Indonesia memiliki jejaring pendidikan dan dawah yang kuat dan mengalami perkembangan yang signifikan pasca Reformasi. Meskipun mendapat tantangan dan penolakan dari sebagian masyarakat lokal yang tidak cocok dengan pola dawahnya, jamaah dan tokoh-tokoh Wahhabi tidak pernah berhenti menyuarakan visi keagamaan mereka melalui mimbar masjid. Wahhabi tidak peduli dengan tantangan tersebut karena menilai apa yang mereka sampaikan adalah bagian dari inti ajaran Islam yang lurus, murni dan kaffah. Prilaku keras di ranah publik dan munculnya kekerasan antara Wahhabi dengan masyarakat lokal melahirkan stigma jika Wahhabi juga bagian dari kelompok radikal. Pada saat yang bersamaan, komunitas internasional sedang memantau pergerakan Wahhabi yang diklaim ikut terlibat “dalam aksi terror 9/11” di bawah komando Osamah bin Laden.

Saipul Hamdi dkk.

Kecaman dan warning dari berbagai pihak kepada anggota Wahhabi termasuk dari aparat keamanan dan pemerintah mendorong Wahhabi untuk membuka diri dan bedalog dengan kelompok luar. Terlebih Wahhabi selalu dikaitkan dengan aksi pengeboman meskipun tidak ada bukti jika anggota mereka terlibat. Namun stigma ini telah berkembang luas sehingga setiap pengeboman semua mata tertuju ke pesantren mereka. Tokoh-tokoh Wahhabi merasa dirugikan karena mereka tidak terlibat dalam aksi terorisme, oleh karenanya tidak ada jalan lain kecuali membuka diri kepada pihak luar. Mereka mengundang pemerintah dan Ormas Islam yang mau berkunjung untuk melihat langsung aktifitas keagamaan mereka. Mereka juga mulai mengubah pendekatan dawahnya yang lebih soft dan berupaya tidak untuk menyerang kelompok Islam yang lain yang berbeda dengan mereka. Upaya inilah yang saya sebut dengan deradikalisasi *from within*, mengubah aksi-aksi dahwah yang radikal yang meresahkan masyarakat.

KESIMPULAN

Upaya deradikalisasi oleh internal Wahhabi membutuhkan dukungan dari pemerintah supaya benar-benar sikap toleransi dan moderat dapat berkembang di komunitas Wahhabi. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan ideology kebangsaan dalam hal ini adalah Pancasila dan wawasan kebangsaan. Santri-santri Wahhabi seharusnya memperoleh pendidikan Pancasila sehingga ada tanggaung jawab dan merasa memiliki bangsa ini. Mereka selama ini hidup di sebuah “negara dalam negara”, karena hanya mengikuti ajaran dan ideology Wahhabi yang tidak semuanya cocok dengan ideology dan undang-undang negara. Pemasangan bendera merah putih pada setiap peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus mengindikasikan perubahan besar pada Wahhabi, yang juga menjadi bagian dari re-radikalisasi *from within*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsori & Ernawati (2019). Khilafah Islamiah in International Islamic Political Perspective, Dalam *Seminar ICIIS*, di Jakarta, Indonesia.
- Ayoob, M. dan Kosebalaban, H. (2009). *Religion and Politics in Saudi Arabia: Wahhabism and the State*. Michigan: Lynne Rienner Publishers.

- Asal, V., Fair, C. C., & Shellman, S. (2008). Consenting to a child's decision to join a Jihad: Insights from a survey of militant families in Pakistan. *Studies in Conflict and Terrorism*, 31(11), 973–994.
- Basalamah, K. (2020). *Apakah Mungkin Khilafah Tegak di Negara Ini?* <https://www.youtube.com/watch?v=U3hhc4JKkXM>.
- Chozin, M.A. (2013). Strategi Dakwah Salafi di Indonesia. *Journal Dakwah*, 14(1), 1-25.
- Commins, David. 2009. *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*. London dan New York: I.B. Tauris.
- Delong-Bas, Natana J. (2007). *Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad*. London: I.B. Tauris.
- Farida, U. (2014). Peran Ikhwanul Muslimin dalam Perubahan Sosial Politik di Mesir. *Jurnal Penelitian*, 8(1), 45-69.
- Hamdi, S., Carnegie, P. J., & Smith, B. J. (2015). The recovery of a non-violent identity for an Islamist pesantren in an age of terror. *Australian Journal of International Affairs*, 69(6), 692–710.
- Hasan, N. (2007). The Salafi movement in Indonesia: Transnational dynamics and local development. *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 27(1), 83–94.
- Herdi, S., Al, C., & Dedy, T. (2019). Terrorism, Wahhabism and Islam (East)-West Dialogues: A Reflection from Indonesia. *Journal of Economic and Social Development*, 6(2), 60-75.
- Iddrissu, A. (2009). *Contesting Islam: Homegrown Wahhabisme, Education and Muslim Identity in Northern Ghana 1920-2005*. Disertasi di Department of History, University of Illinois at Urbana Campaign.
- Indra, R. (2017). Wahabism: Padri Movement in Minangkabau To the Islamic Defender Organization in Indonesia. *Researchers World: Journal of Arts, Science and Commerce*, 8(2), 79–91.

Saipul Hamdi dkk.

- Jones, Seth G. Rand, Santamonica CA. (2014). *A Persistent Threat: The Evolution of al Qa'ida and Other Salafi Jihadists*. Santa Monica, CA: Rand Corporation
- Lauziere, H. (2010). The Construction of Salafiyya: Reconsidering Salafism from the Perspective of Conceptual History. *International Journal of Middle East Studi*, 42(03), 369-389.
- Mahfud, MD. (2019). *Tegas! Penjelasan Menko Polbukam Mahfud MD Soal 'Kafir' dan Sistem Khilafah* | ILC (29/10/2019). <https://www.youtube.com/watch?v=3i96m5pUYl0>.
- Michael, R. (2009). *Wahhabism is it a factor in the spread of global terrorism?* MA Thesis Iin Naval Postgraduate School Monterey, California:.
- Moore, C. dan Tumetly P. (2009). Assesing Unholy Alliances in Chechnya from Communism and Nationalism to Islamism and Salafism. *Journal of Communist Studies and Transnational Politics*, 25(1), 73-94.
- Prasetyo, B. (2019). Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dalam Perspektif Sosial Politik. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19 (2), 251-264.
- Rohmaniyah, I., & Woodward, M. (2012). Wahhabi Perspectives on Pluralism and Gender: A Saudi- Indonesian Contrast. *Report, 1201*. Center for Strategic Communication Arizona State University
- Romero, Antonio J. (2007). The Different Faces of Islamic Terrorism. *Journal of International Review of Sociology*, 17(03), 443-458.
- Rubaidi, A. (2008). *Radikalisme, Nahdlatul Ulama & dan Masa Depan Moderatisme di Indonesia*. Bandung: Logung Pustaka.
- Rubin, Barry M. (2010). *Guide to Islamist Movements*. New York: M.E Sharpe
- Valentine, Simon Ross. (2015). *Force and Fanaticism: Wahhabism in Saudi Arabia and Beyond*. London: Oxford University Press.
- Wulandari, Hesti. (2014). *Terorisme dan Kekerasan di Indonesia: Sebuah Antologi Kritis*. Lulu.com